

## **SIARAN PERS**

### **Terkait Penyerahan LHP atas LKPD TA 2015**

---

Pada hari ini, Jum'at, 24 Juni 2016, bertempat di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan menyerahkan LHP atas LKPD Kab. Donggala dan Kab. Morowali TA 2015.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK diketahui bahwa penyusunan **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali** telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur pengendalian intern yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. **Dengan demikian** BPK menyimpulkan bahwa opini atas **Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Morowali** tahun 2015 adalah **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”**.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian dua Pemerintah Kabupaten tersebut, yaitu:

#### **A. PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA**

1. Pengelolaan kas dan keuangan daerah pada Pemkab Donggala belum tertib ;
2. Data Pendukung Penyajian Piutang dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah atas Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Desa dan Perkotaan (PBB-P2) tidak akurat;
3. Kelemahan proses verifikasi dan pengendalian atas realisasi pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum (PJU);
4. Kelemahan dalam verifikasi, pencatatan dan pelaporan realisasi belanja dan sisa Kas yang berasal dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala ;
5. Kekurangan Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Perlum sebesar Rp180,03 juta;
6. Biaya Perawatan Kendaraan Bermotor pada Sekretariat DPRD sebesar Rp433,10 juta kepada pihak yang tidak berhak;
7. Tunjangan PNS dibayarkan kepada pegawai yang sedang tugas belajar sebesar Rp134,04 juta;
8. Kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa pada Kegiatan Pengembangan/Peningkatan Pertanian di Distanakesawan Kabupaten Donggala sebesar Rp1,73 miliar ;
9. Ketidaksesuaian metode pelaksanaan pekerjaan dan kekurangan volume pada paket pekerjaan Jalan Labean-Manimbaya Segmen II dan Segmen III sebesar Rp1,79 miliar.

## **B. PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**

1. Pelaksanaan Kegiatan Belanja Tidak Berdasarkan pada Kemampuan Riil Keuangan Daerah;
2. Mekanisme Penganggaran, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Hibah Tidak Tepat serta Pengendalian Pelaksanaannya Lemah;
3. Mekanisme Penyertaan, Pencatatan, dan Pengawasan Pengelolaan Investasi Permanen Belum Memadai;
4. Penatausahaan Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2015 Kurang Memadai
5. Terdapat Penggunaan Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan Guru untuk Pembayaran Belanja Lainnya;
6. Retribusi IMB pada Badan Pelayan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Morowali Kurang Ditetapkan;
7. Mekanisme Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Tidak Sesuai dengan Peraturan Bupati;
8. Kebijakan Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Harian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Tidak Sesuai Ketentuan;
9. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp2,02 miliar;
10. Pengendalian Pengadaan Tanah Melalui Proses Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Lemah dan Pelaksanaannya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
11. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Denda Senilai Rp516,92 juta.

Laporan Hasil Pemeriksaan ini kami harapkan dapat dimanfaatkan oleh para Pimpinan dan Anggota Dewan dalam rangka melaksanakan fungsinya yaitu fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan baik untuk pembahasan Rancangan Perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2015 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD TA 2016.

**HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**